

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING TREATMENT IN MINING COMPANY

Wenni Anggita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung
wanggitha@ymail.com

Abstract

The environmental problem in Indonesia is an important factor to be considered considering the impact of poor environmental management is becoming more apparent nowadays. The choice of environmental problems in this study is because this problem is closest to human life. The purpose of this researh to analyze environmental accounting treatment at PT. Timah (Persero) Tbk which concerns identification, recognition, measurement, presentation and disclosure. This study which conducted use primary and secondary data. This study is decriptive study with qualitative approach which is the method which done by collecting, preparing and analyzing the obtained data descriptively.

The result of this researh found that environmental accounting treatment has been very effective. The financial statements of PT. Timah (Persero) Tbk has been in accordance to applicable financial accounting standards. However, the disclosure of the company's environmental management cost still referring to the financial accounting standards (PSAK 33) which is no longer valid.

Keywords: Environment Accounting, management, Effective, Standard

A. LATAR BELAKANG

Isu lingkungan semakin menarik untuk dipelajari seiring dengan perkembangan teknologi global dan ekonomi dunia. Perlahan ada perubahan mendasar dalam pola kehidupan masyarakat yang secara langsung atau tidak berdampak pada lingkungan. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari masalah lingkungan yang semakin terasa dampaknya. Era industrialisasi di satu sisi berfokus pada penggunaan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang mengabaikan aspek lingkungan.

Selama ini perusahaan dianggap sebagai institusi yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi dan penyedia lapangan kerja. Perusahaan dalam masyarakat memiliki legitimasi untuk bergerak bebas untuk melakukan kegiatannya, tetapi seiring berjalannya waktu karena posisi perusahaan menjadi sangat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampaknya juga akan sangat besar. Dampak yang timbul dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini tentunya akan membawa dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Dampak negatif yang paling umum ditemukan dalam setiap bisnis operasional perusahaan adalah polusi suara, produksi limbah, kesenjangan, dll. Dan dampak semacam itu

disebut Eksternalitas (Harahap, 2011). Dampak Eksternalitas yang berlebihan pada kehidupan orang yang menginginkan manfaat perusahaan, menyebabkan keinginan untuk mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis sehingga dampak negatif Eksternalitas ini tidak menjadi lebih besar.

Di Indonesia peraturan lingkungan telah diatur oleh terbitnya Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Namun, hingga 2017 praktik pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan di Indonesia masih belum efektif karena tidak ada yang diatur secara khusus dalam standar akuntansi. Pelaporan biaya lingkungan masih bersifat sukarela dan di luar standar akuntansi keuangan. Hal ini dijelaskan dalam PSAK No. 1 Tahun 2017, paragraf empat belas (14) yang menyatakan:

"Beberapa entitas juga hadir, mulai dari laporan keuangan, laporan lingkungan dan laporan nilai tambah, terutama untuk industri di mana faktor lingkungan signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan yang memainkan peran penting."

Perlakuan akuntansi lingkungan dapat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK, 2014), PSAK No. 1 tahun 2017 tentang Penyajian Laporan Keuangan, serta ISAK 29 tahun 2017 tentang Biaya Mengupas Lapisan Tanah Produksi di Tambang Terbuka.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah pemborosan produksi. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan, Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan usaha dan atau produksi, sedangkan polusi didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia sehingga melebihi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan. Limbah yang dihasilkan dari operasi perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga limbah tersebut memerlukan manajemen dan penanganan khusus oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar pada lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

B. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan serta akuntansi manajerial bisnis internal. Fokus utamanya adalah pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi manajerial untuk keputusan bisnis internal. Badan

Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menjelaskan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan adalah biaya yang secara langsung mempengaruhi perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini istilah "biaya pribadi"). Kedua, akuntansi lingkungan juga mencakup biaya individu, masyarakat dan lingkungan dari suatu perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Ikhsan (2008) mengatakan tujuan pengembangan akuntansi lingkungan untuk menilai efektivitas kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas manajemen lingkungan, keseluruhan biaya konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan manajemen lingkungan. Dia juga mengatakan akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan pelestarian lingkungan dan hasilnya kepada publik.

3. Biaya Kualitas Lingkungan

Palace (2011) mengatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya lingkungan juga merupakan pengorbanan untuk melestarikan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah objek di luar perusahaan yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan budaya.

4. ISAK Nomor 29 Tahun 2017: Biaya Mengupas Fase Produksi Lapisan Tanah Di Penambangan Terbuka

Dalam operasi penambangan terbuka, entitas mungkin menganggap perlu memindahkan bahan bekas tambang untuk dibuang guna mendapatkan akses ke cadangan mineral. Aktivitas penghilangan mineral residu semacam itu dikenal sebagai "pengupasan lapisan tanah". Selama fase pengembangan tambang, biaya pengupasan tanah umumnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan, pengembangan dan depresiasi pertambangan.

Entitas pertambangan dapat melanjutkan pemindahan lapisan penutup dan mengeluarkan biaya pengupasan selama fase produksi tambang. Bahan yang dipindahkan ketika melucuti lapisan tanah pada tahap produksi tidak selalu 100% limbah, seringkali merupakan kombinasi dari mineral dan limbah. Rasio mineral terhadap limbah dapat berkisar

dari yang berkualitas rendah, berkualitas rendah hingga berkualitas tinggi yang dapat menguntungkan.

5. PSAK Nomor 64 Tahun 2017: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti untuk tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Ketika dikaitkan dengan data, pengungkapan didefinisikan sebagai menyediakan data yang berguna karena jika tidak berguna, tujuan pengungkapan tidak akan tercapai (Ikhsan, 2008).

Menurut Suwardjono (2013), secara umum tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Bentuk pengungkapan dalam laporan keuangan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan PSAK No. 1 Tahun 2015 tetapi tidak ada bentuk pengungkapan mengenai biaya lingkungan dalam IFRS.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasojo (2012) berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Lingkungan (Studi tentang KLH / BLH, Dinkeb dan PDAM Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah)" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi dan manajemen lingkungan pada penerapan akuntansi lingkungan di organisasi tingkat lokal. Hasil penelitian regresi menunjukkan bahwa ukuran organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi lingkungan, pernyataan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi penerapan akuntansi lingkungan dan manajemen lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi lingkungan.

Penelitian yang berjudul "Akuntansi Lingkungan: Antara Mandatory dan Voluntary" yang dilakukan oleh Nuswantara (2009) bertujuan untuk menggambarkan bahwa Mandatory lebih baik daripada Voluntary dalam menyelesaikan masalah dan bahaya lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya intervensi dari pemegang wewenang, baik pemerintah sebagai pemegang legislatif yang mengeluarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan serta dewan penetapan standar. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi masih rendah. Demikian pula, tingkat kesadaran lingkungan masyarakat Indonesia masih relatif rendah jika dilihat dari sudut pandang regulasi, penegakan hukum dan eksternalitas negatif yang terkait dengan lingkungan.

6. Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja yang mendasari penelitian ini adalah penerapan akuntansi lingkungan dalam alokasi biaya lingkungan, baik dalam laporan keuangan ada anggaran untuk alokasi biaya lingkungan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yaitu PT. Timah (Persero). Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah dengan teknik proporsional sampling, artinya pemilihan sampel di unit bisnis pertambangan proporsional dari tingkat kewenangan unit bisnis dalam perusahaan yang kompeten dalam masalah lingkungan. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman.

D. PEMBAHASAN

Dalam proses produksi, terutama pemisahan bijih timah, tidak dapat dihindari bahwa penggunaan unsur-unsur termasuk bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan unsur-unsur yang mengandung radioaktif. Semua bahan termasuk elemen B3 dan Radioaktif berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Begitu juga dengan penanganan limbah yang dihasilkan. Sementara untuk mengetahui potensi radiasi, silakan lakukan pemantauan setiap tiga bulan.

Dengan semua risiko lingkungan ini, perusahaan menganggap konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bumi. Perusahaan menetapkan konsep penambangan ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan penambangan di daerah IUP. Konsep tersebut dilakukan secara konsisten, bahwa perusahaan berupaya mengembalikan habitat bekas areal penambangan ke kondisi awal. Perusahaan berupaya meminimalkan terjadinya perubahan bentang alam ekstrem yang mengakibatkan hilangnya vegetasi di lahan beserta ekosistem yang menyertainya.

1. Identifikasi Akuntansi Lingkungan di PT. Timah (Persero) Tbk

Pertama kali perusahaan ingin menentukan biaya untuk mengelola biaya eksternal penanganan yang terjadi dalam kegiatan operasinya adalah untuk mengidentifikasi dampak negatif. Dalam mengidentifikasi biaya lingkungan, belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Keuangan (FAS / SAK). Jadi identifikasi didasarkan pada Kerangka Dasar Persiapan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK, 2014) yang berlaku secara umum.

Berdasarkan KDPPLK, 2014, biaya yang dikeluarkan memiliki dua posisi: Identifikasi peristiwa / transaksi yang dilakukan untuk mengidentifikasi akun terkait.

Proses mengidentifikasi biaya, memiliki dua posisi sebagai aset atau sebagai biaya (KDDPLK, 2014). Biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah (Persero) Tbk dalam biaya pemeliharaan, konservasi dan investasi lingkungan adalah biaya pengelolaan limbah, emisi, dan remediasi serta Pencegahan Biaya dan pengelolaan lingkungan.

2. Pengakuan Akuntansi Lingkungan di PT. Timah (Persero) Tbk

Perusahaan membuat Biaya Biaya Rehabilitasi Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No.32 / 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, PP 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang, PerMen no. 7/2014 tentang Implementasi Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara. Penyediaan Biaya Rehabilitasi Lingkungan ditetapkan sehubungan dengan kewajiban hukum terkait dengan penarikan aset tambang terkait dan aset jangka panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, sistem peremukan dan penanganan, infrastruktur dan fasilitas lain yang dihasilkan dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan operasi normal aset.

3. Pengukuran Akuntansi Lingkungan di PT. Timah (Persero) Tbk

Tahap pengukuran adalah proses menentukan jumlah uang untuk mengenali dan memasukkan setiap elemen dari laporan keuangan. Dasar pengukuran yang digunakan untuk mengukur Provisi Rehabilitasi Biaya PT Timah adalah menggunakan basis aset lancar dari estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.

Perubahan dalam pengukuran liabilitas operasi yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut atau perubahan tingkat diskonto harus ditambahkan atau dikurangkan dari biaya perolehan aset terkait pada tahun berjalan.

4. Presentation Akuntansi Lingkungan di PT. Timah (Persero) Tbk

Penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan bersifat sukarela; 1 Tahun 2015, paragraf empat belas (14) menyatakan:

"Beberapa entitas juga hadir, mulai dari laporan keuangan, laporan lingkungan dan laporan pertambahan nilai, terutama untuk industri di mana faktor lingkungan signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna pelaporan yang memainkan peran penting. Laporan disajikan di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan (SAK)."

Kewajiban ini diakui sebagai kewajiban dalam hal kewajiban hukum atau konstruktif yang timbul dari aktivitas yang telah dilakukan, diukur pada dan setelah pengakuan nilai kini dari estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.

Terkait dengan teori akuntansi pendukung, ada empat model komprehensif. Menurut Haryono (2003) model yang komprehensif dapat berfungsi sebagai model alternatif pelaporan keuangan lingkungan. Model komprehensif dalam penyajian biaya lingkungan terdiri dari model normatif, model hijau, model intensif lingkungan dan model aset nasional. PT Timah (Persero) Tbk menggunakan model komprehensif yaitu Model Normatif.

5. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan di PT. Timah (Persero) Tbk

Pengungkapan adalah tahap terakhir dari proses perlakuan akuntansi. Bentuk pengungkapan adalah transparansi suatu entitas kepada publik. Selain itu, pengungkapan memberikan informasi berguna yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Sebagai wujud komitmen PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan dan pasca penambangan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 33) menyiapkan dokumen penyediaan lingkungan.

Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp7,5 miliar, naik dari realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp2,8 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan IPAL di 4 Lokasi, Pengembangan TPS LB3, kenaikan biaya analisis Air Limbah / air laut, serta kenaikan biaya analisis udara, dan pengerjaan 2 Dokumen Lingkungan.

E. KESIMPULAN

1. Laporan Keuangan PT Timah (Persero) Tbk telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Namun, untuk pengungkapan laporan biaya manajemen lingkungan, perusahaan tidak menerapkan ISAK 29 karena pengelolaan pertambangan darat adalah mitra, PT Timah hanya membayar setiap ton timah yang diproduksi sehingga tidak memiliki biaya pengupasan tanggihan yang dicatat pada laporan keuangan. Dalam laporan lingkungan PT Timah (Persero) Tbk masih mengacu pada standar akuntansi keuangan (PSAK 33) yang tidak lagi berlaku.

2. Perlakuan Akuntansi Lingkungan, antara lain:
 - a. Sebuah Biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah (Persero) Tbk dalam biaya pemeliharaan, konservasi dan investasi lingkungan adalah biaya pengelolaan limbah, emisi, dan remediasi serta Pencegahan Biaya dan pengelolaan lingkungan. Penyisihan untuk biaya rehabilitasi lingkungan diakui sebagai liabilitas ketika liabilitas hukum atau konstruktif timbul dari aktivitas yang telah dilakukan. Perubahan dalam pengukuran liabilitas yang terjadi selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sedangkan kenaikan liabilitas sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.
 - b. Penyediaan Biaya Rehabilitasi Lingkungan ditetapkan sehubungan dengan kewajiban hukum terkait dengan penarikan aset tambang terkait dan aset jangka panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, sistem peremukan dan penanganan, infrastruktur dan fasilitas lain yang dihasilkan dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan operasi normal aset.
 - c. Dasar pengukuran yang digunakan untuk mengukur Penyisihan Rehabilitasi Biaya PT Timah adalah dengan menggunakan basis aset lancar dari estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.
 - d. Pada tahap presentasi, PT Timah (Persero) Tbk menyajikan Penyediaan Biaya Rehabilitasi Lingkungan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebagai kewajiban. PT Timah (Persero) Tbk menggunakan model Normatif Model yang komprehensif. Model ini mengakui dan mencatat biaya lingkungan keseluruhan dari satu ruang akun secara umum.
 - e. Sebagai wujud komitmen PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan dan pasca penambangan, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 33), Perusahaan menyiapkan dokumen penyediaan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan, Arfan. 2008. *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nuswantara, Dian Anita. 2009. Akuntansi Lingkungan: Antara Mandatory dan Voluntary. *Jurnal pelangi Ilmu*. Vol. 2 No. 2.
- Palace, Violetta. 2011. *Analisis Biaya Lingkungan*. (rainyviolet.blogspot.com/2011/10/analisis-biaya-lingkungan.html). diakses tanggal 20 Januari 2017.
- Prasojo, Taufiq Bagus, dan Agus Purwanto. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlakuan Akuntansi Lingkungan (Studi pada KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Vol 2 No 1, hal 1.
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.